

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Letak secara geografis Kabupaten Sleman yang sangat strategis yaitu sebagai pintu masuk ke wilayah kota Yogyakarta, menyebabkan pertumbuhan di semua sektor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan jumlah permukiman yang semakin meningkat didukung oleh ketersediaan infrastruktur sebagai pendukung permukiman, selain itu ketersediaan jaringan jalan mempermudah masyarakat dalam melakukan pergerakan. Pergerakan kegiatan sehari-hari masyarakat meliputi bekerja, sekolah, sosial, berdagang, berbelanja, berekreasi, bisnis dan perjalanan ke rumah. Akibat pergerakan tersebut maka muncul kebutuhan terhadap moda angkutan untuk melakukan perjalanan, dimana fenomena ini ditangkap oleh masyarakat yang memiliki modal untuk menyediakan jasa transportasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan moda transportasi jalan secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan lalulintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib dan teratur, nyaman dan efisien serta mampu memadukan moda transportasi lainnya.

Salah satu aspek implementasi transportasi jalan diantaranya dengan pengaturan terhadap jaringan trayek dan jumlah kebutuhan kendaraan umum,

sehingga dapat terkendali terhadap pelayanan angkutan dengan kendaraan umum, termasuk angkutan umum perdesaaan, sehingga adanya keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang.

Selama ini penataan angkutan perdesaan belum berada dalam alur utama kebijakan dan keputusan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem transportasi yang berimbang, efisien, dan berkualitas. Belum terciptanya angkutan perdesaan yang efisien dan berkualitas menjadikan angkutan perdesaan belum merupakan alternatif utama yang patut diperhitungkan bagi pembuat perjalanan, termasuk angkutan umum perdesaaan di Kabupaten Sleman.

Pada kondisi saat ini pelayanan angkutan perdesaan di Kabupaten Sleman dilayani oleh sembilan trayek. Jumlah kendaraan menurut izin yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman tahun 2014 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) kendaraan yang terdiri dari 40 (empat puluh) jenis bus kecil dan 104 (seratus empat) jenis mobil penumpang umum (MPU). Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang beroperasi cenderung berkurang.

Hal ini dikarenakan tidak berimbangnya antara biaya operasi kendaraan yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima oleh operator. Setiap beroperasi pengemudi harus menanggung biaya operasional kendaraan ditambah harga bahan bakar minyak (BBM) yang naik dan turun mengakibatkan operasional pelayanan angkutan perdesaan tidak optimal sehingga pendapatan pengemudi tidak menentu,

kadang-kadang dapat membawa pulang uang dari sisa biaya operasional kendaraan tetapi kadang-kadang hanya dapat untuk menutup biaya operasional kendaraan karena beban setoran yang harus ditanggung pengemudi.

Dari sisi manajemen pengelolaan yang menggunakan sistem setoran dan pengoperasiannya dilakukan oleh masing-masing pemilik selaku anggota koperasi maka akibatnya akan menyulitkan pembinaan dan pengendaliannya. Koperasi tidak mampu menertibkan anggotanya yang tidak tertib membayar iuran anggota, melanggar jadwal perjalanan dan lain-lain. Pelanggaran tersebut disebabkan untuk mengejar setoran sehingga menyebabkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan perdesaan menurun dan beralih ke penggunaan kendaraan pribadi terutama sepeda motor dan mobil.

Memperhatikan kenyataan tersebut maka menjadi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk menjawab permasalahan tersebut. Salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah memberikan subsidi bagi operator yang bersedia melakukan pelayanan angkutan umum perdesaan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 telah melakukan studi tentang integrasi angkutan perdesaan pada kawasan strategis sebagai feeder. Hasil studi tersebut memberikan gambaran tentang rute angkutan perdesaan Kabupaten Sleman yang disarankan untuk dikembangkan sebagai bagian dari angkutan umum yang terintegrasi di wilayah perkotaan Yogyakarta. Namun demikian dari trayek yang disarankan masih perlu diperjelas lagi tentang mekanisme subsidi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk mencari

formulasi tentang subsidi terhadap angkutan perdesaan di Kabupaten Sleman melalui analisis biaya operasi kendaraan (BOK).

1.2 Perumusan Masalah

Pelayanan angkutan perdesaaan di Kabupaten Sleman yang semakin menurun jumlahnya mengakibatkan kualitas pelayanan angkutan perdesaan yang kurang optimal dari penilaian penumpang dan penilaian dari sisi pengemudi, pendapatan yang tidak seimbang dengan biaya operasi kendaraan yang dikeluarkan oleh sehingga dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana kinerja saat ini angkutan perdesaan yang melayani penumpang di Kabupaten Sleman,
- b. trayek manakah yang perlu diberi subsidi, agar pelayanannya dapat ditingkatkan kualitasnya, sesuai dengan hasil studi pada tahun 2014 tentang integrasi angkutan perdesaan pada kawasan strategis sebagai feeder yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,
- c. bagaimana analisis perhitungan subsidi angkutan perdesaan Kabupaten Sleman berdasarkan studi pada tahun 2014 tentang integrasi angkutan perdesaan pada kawasan strategis sebagai feeder yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi dilakukan terhadap sembilan jaringan trayek angkutan perdesaan di Kabupaten Sleman, sesuai izin trayek yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman tahun 2014,
- b. perhitungan subsidi hanya dilakukan pada trayek mengacu pada hasil studi pada tahun 2014 tentang integrasi angkutan perdesaan pada kawasan strategis sebagai feeder yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,
- c. perhitungan berdasarkan formulasi perhitungan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tanggal 16 Agustus 2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur.

1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan analisis subsidi angkutan perdesaan melalui biaya operasi kendaraan (BOK) di Kabupaten Sleman telah banyak dilakukan oleh para peneliti baik dari kalangan akademis maupun kalangan praktisi, diantara beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan metode dan alat analisis yang digunakan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penulisan ini.

- a. Munandar (2009) menganalisis mekanisme subsidi angkutan umum pada trayek utama sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di kota Semarang. Meneliti seberapa besar perubahan biaya produksi pelayanan (yang didalamnya terdapat variabel-variabel seperti Biaya Operasi Kendaraan (BOK), dan lain-lain) dan pengguna angkutan umum penumpang melalui perhitungan *ability to pay* (ATP) dari angkutan umum penumpang (AUP) dengan dari fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga diperoleh output berupa mekanisme bentuk dan besaran subsidi yang tepat untuk angkutan umum pada trayek utama di Kota Semarang.
- b. Pranoto (2005), menghitung kebutuhan subsidi pemerintah terhadap biaya pengelolaan angkutan umum bus Damri di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah perhitungan biaya operasi kendaraan (BOK) standar, data biaya operasi kendaraan (BOK) riil, dan selisih antara BOK standar dan BOK riil yang merupakan rumusan subsidi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna angkutan perdesaan, antara lain :

- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman tentang kondisi sekarang karakteristik pelayanan angkutan perdesaan sehingga dapat digunakan sebagai landasan peningkatan pelayanan angkutan perdesaan yang berkualitas,

- b. sebagai bahan untuk melakukan perubahan pelayanan angkutan perdesaan dari sistem setoran dirubah dengan menggunakan skema pembiayaan atau perhitungan subsidi dengan sistem buy the service yang dapat diterapkan untuk angkutan perdesaan,
- c. sebagai bahan referensi bagi berbagai pihak yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian analisis subsidi angkutan perdesaan melalui perhitungan biaya operasi kendaraan di Kabupaten Sleman adalah :

1. Menganalisis kinerja pelayanan sembilan trayek angkutan perdesaan yang melayani trayek di wilayah Kabupaten Sleman saat ini yang meliputi analisis jaringan trayek, *load factor*, headway, jarak tempuh, waktu tempuh, jumlah penumpang dan kecepatan rerata dan rute aktual.
2. menentukan trayek yang akan dikembangkan sebagai angkutan umum perdesaan yang terintegrasi dengan angkutan umum perkotaan yang melayani di wilayah di Kabupaten Sleman,
3. menganalisis skema pembiayaan atau menghitung besaran subsidi yang dapat diterapkan untuk angkutan perdesaan yang terintegrasi dengan angkutan umum perkotaan yang melayani di wilayah Kabupaten Sleman.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan tentang beberapa definisi dari studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dikemukakan tentang teori-teori yang dijadikan dasar analisis dan pembahasan masalah.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan pendekatan dari teori kemudian diuraikan menjadi suatu usulan pemecahan masalah yang berbentuk langkah-langkah pemecahannya.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang kajian atas hasil dari pengolahan data yang diperoleh serta analisis dari hasil pengolahan data dimaksud

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan memberikan saran berupa rekomendasi subsidi angkutan perdesaan di Kabupaten Sleman.